

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia digambarkan sebagai negara kepulauan yang mempunyai ciri keragaman budaya. Keragaman bangsa Indonesia sangat banyak, mulai dari perbedaan bahasa, etnis (suku bangsa), dan keyakinan agama.<sup>1</sup> Kekayaan inilah yang menjadikan bangsa Indonesia memiliki kekuatan dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara yang beralaskan Pancasila. Ketika di negara lain berbagai bangsa pecah kemudian mendirikan negara baru, namun Indonesia menunjukkan warna yang unik yaitu berbagai bangsa, suku, ras, dan golongan yang mempunyai budaya berbeda, bersatu dalam payung Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kondisi toleransi antar umat beragama di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang perlu diatasi. Untuk mencapai tujuan tersebut, nilai toleransi menjadi kunci penting yang harus diterapkan dalam masyarakat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kerukunan dan saling menghargai di antara warga negara, serta menjadikan Bhineka Tunggal Ika, simbol persatuan Indonesia, sebagai panduan bahwa meskipun berbeda-beda, kita tetap satu kesatuan.

Toleransi berasal dari bahasa latin *tolerare* yang berarti sabar dan pengendalian diri. Toleransi adalah sikap masyarakat yang tidak menyimpang, serta

---

<sup>1</sup> Rahardjo, Turnomo. 2005. *Menghargai Perbedaan Kultural Mindfulness dalam Komunikasi Antaretnis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

saling menghargai dan menghormati semua tindakan yang dilakukan orang lain. Menurut Winiarska dan Klaus Toleransi adalah sikap menghargai perbedaan pendapat, perilaku, gaya hidup seseorang.<sup>2</sup> Sedangkan menurut kamus Merriam-Webstras, toleransi adalah perilaku yang berhubungan dengan tanggapan orang lain.<sup>3</sup> Sehingga dapat kita pahami dan simpulkan bahwa toleransi merupakan tanggapan atau respon yang diberikan oleh seseorang terkait dengan pilihan, prinsip dan juga keyakinan yang dianut oleh orang lain.

Toleransi dan kerukunan antar umat beragama memiliki hubungan yang erat dan saling mempengaruhi secara konseptual. Sikap toleransi yang indah dapat berkontribusi positif terhadap terciptanya kerukunan, begitu pula sebaliknya, kerukunan di antara umat beragama akan mempengaruhi keberhasilan penerapan nilai toleransi. Dengan demikian, jika toleransi berhasil dibangun dengan baik di antara umat beragama, maka masyarakat dapat hidup berdampingan dengan rukun dan damai.

Toleransi sendiri memiliki tiga hal pokok yang menjadi landasan utama untuk memastikan kelancaran dan keberhasilannya, yaitu saling menghormati, menjunjung tinggi kesetaraan, dan berkolaborasi secara harmonis. Dengan adanya sikap saling menghormati, masyarakat akan menerima perbedaan antar individu atau kelompok agama dengan penuh pengertian. Kesetaraan juga sangat penting,

---

<sup>2</sup> Szejnberg, A., Jasiński, T. L. 2014. Measurement of the tolerance general level in the higher education students. *International Journal of Latest Research in Humanities and Social Science (IJLRHSS)*, Vol. 1 No. 4, Hal. 01-07.

<sup>3</sup> Meiza, A. 2018. Sikap Toleransi dan Tipe Kepribadian Big Five pada Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol. 5 No. 1, Hal. 43-58.

karena tanpa memandang perbedaan agama, semua warga negara dianggap setara dan memiliki hak yang sama. Selain itu, kerja sama yang dilandasi oleh toleransi akan menggalang ikatan antarumat beragama, memperkuat persatuan, dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Dengan menerapkan nilai-nilai toleransi tersebut, masyarakat Indonesia dapat mencapai tingkat kerukunan yang lebih tinggi dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan berdaya saing. Dalam harmoni dan kerukunan antarumat beragama, Indonesia dapat memperkuat identitasnya sebagai bangsa yang berbeda-beda tetapi tetap satu kesatuan, sesuai dengan semboyan negara Bhineka Tunggal Ika.

Kehidupan masyarakat telah berkembang menjadi multikulturalisme, mengarah kepada multikultural yang mencakup kepada keberagaman budaya dalam suatu wilayah yang ditentukan oleh latar belakang sosial, ras, jenis kelamin, adat-istiadat, dan agama. Multikulturalisme dalam kaitannya dengan keberagaman agama di Indonesia dalam pelaksanaannya mendapat perhatian yang baik dari negara dan pemerintah. Sebagaimana yang terkandung dalam Pancasila khususnya sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa yang mengandung makna memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai apa yang diyakininya, serta antar pemeluk agama harus saling menghormati dan bekerjasama.

Kehidupan masyarakat telah mengalami perkembangan menjadi multikulturalisme, di mana keberagaman budaya dalam suatu wilayah mencakup latar belakang sosial, ras, jenis kelamin, adat-istiadat, dan agama. Di Indonesia, multikulturalisme terkait dengan keberagaman agama telah mendapatkan perhatian

yang baik dari negara dan pemerintah. Prinsip ini tercermin dalam Pancasila, terutama pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Selain itu, sila tersebut juga mendorong saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama.

Kehidupan masyarakat telah mengalami perkembangan menjadi multikulturalisme, di mana keberagaman budaya dalam suatu wilayah mencakup latar belakang sosial, ras, jenis kelamin, adat-istiadat, dan agama. Di Indonesia, multikulturalisme terkait dengan keberagaman agama telah mendapatkan perhatian yang baik dari negara dan pemerintah. Prinsip ini tercermin dalam Pancasila, terutama pada sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, yang memberikan kebebasan kepada bangsa Indonesia untuk memeluk agama dan kepercayaan sesuai keyakinan masing-masing. Selain itu, sila tersebut juga mendorong saling menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama.

Dalam pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2), dinyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan keyakinan agamanya. Landasan hukum ini menjadi dasar bagi praktik kehidupan beragama di Indonesia. Artinya, Negara Indonesia memberikan kebebasan kepada warganya untuk memilih dan mengamalkan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Dengan demikian, landasan hukum pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 ayat (2) memberikan dasar bagi praktik kehidupan beragama di Indonesia yang menjunjung tinggi kebebasan

beragama, namun juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kerukunan dan toleransi beragama untuk memastikan stabilitas nasional yang berkelanjutan.

Kondisi toleransi antar umat beragama di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang perlu diatasi. Sejarah mencatat banyak konflik SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan) yang terjadi di Indonesia. Meskipun peristiwa-peristiwa tersebut seharusnya menjadi pengalaman yang mengajarkan bangsa Indonesia untuk lebih waspada dan menjaga rasa saling toleransi beragama, namun kenyataannya masih terdapat konflik-konflik baru yang muncul. Contohnya, setelah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta tahun 2017, terjadi konflik yang berlanjut hingga pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2019. Isu agama dan politik menjadi sumber ketegangan yang hampir membawa Indonesia ke dalam persoalan yang lebih serius terkait isu agama.

Contoh kasus lainnya adalah konflik Ambon,<sup>4</sup> Maluku pada tanggal 19 Januari 1999, konflik Ambon yang terjadi bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri 1419 Hijriah ini bermula dari pertikaian antara sopir angkot yang bernama Jacob Lauhery dengan pemuda Muslim keturunan Bugis yang beragama Islam, selanjutnya peristiwa tersebut berkembang besar menjadi konflik agama (Islam dan Kristen). Konflik yang terjadi sejak Januari 1999 itu menelan banyak korban jiwa, harta benda, dan sebagian warga mengungsi hingga ke Sulawesi.

---

<sup>4</sup> Jamin Safi. 2017. Konflik Komunal: Maluku 1999-2000. *Jurnal Pendidikan Sejarah STKIP Kie Raha Ternate* Vol. 12. No. 2 Hal 33-44.

Adapun contoh kasus lain adalah konflik Poso. Konflik ini terjadi pada tahun 1998 sampai berlarut-arut tahun 2001. Konflik yang tergolong konflik agama ini melibatkan masyarakat muslim dan umat kristen di Poso. Konflik Poso sebenarnya adalah konflik realistik yaitu, perebutan kekuasaan politik antar elit politik lokal di Poso yang kemudian massa dilibatkan dengan identitas agama dan etnis dengan tujuan untuk memobilisasi massa dalam memperoleh kekuasaan.<sup>5</sup> Ketika konflik sudah menyentuh ranah SARA yaitu identitas agama membuat konflik Poso menjadi konflik yang berkepanjangan. Pendek kata konflik ini mulai reda ketika Pemerintah Pusat melalui tangan Menko Kesra Jusuf Kalla yang dalam hal ini ditunjuk sebagai mediator dalam misi perdamaian.

Selanjutnya kasus pembakaran Masjid di Kabupaten Tolikara, Provinsi Papua pada tahun 2015 lalu. konflik yang terjadi pada saat umat Muslim di Tolikara sedang melaksanakan salat Idul Fitri ini terjadi karena dipicu oleh beberapa hal, antara lain adanya acara seminar Kebaktian Kebangkitan Ruhani (KKR) oleh Gereja Injil di Indonesia (GIDI) yang saat itu bersamaan pada Hari Raya Idul Fitri, penyelenggara KKR yang merasa terganggu dengan ibadah umat Muslim yang menggunakan pengeras suara sejak subuh sampai pagi, dan aparat keamanan yang saat itu berdekatan dengan lokasi konflik dianggap tidak sigap melakukan penanganan.<sup>6</sup>

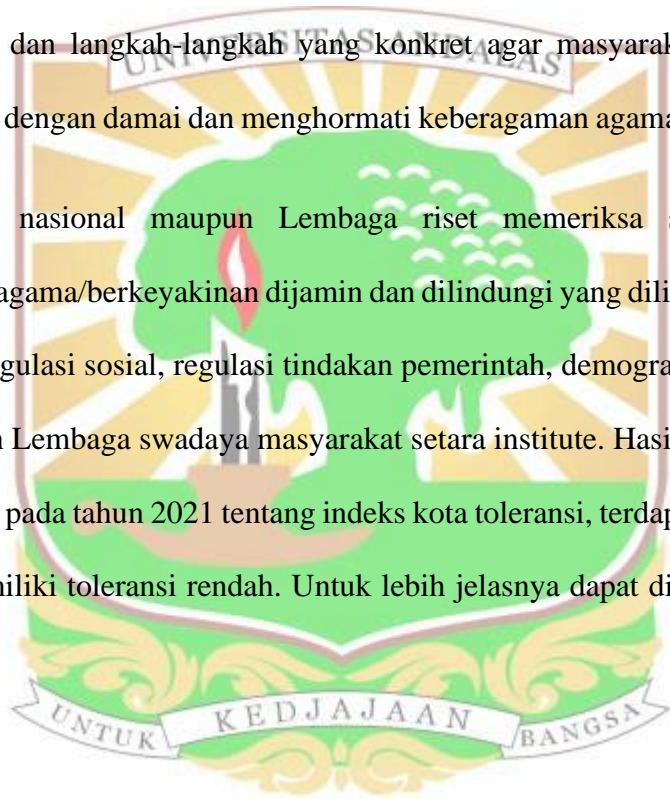
---

<sup>5</sup> Igneus Alganih. 2006. Konflik Poso (Kajian Historis Tahun 1998-2001). *Jurnal Criksetra*, Vol. 5, No. 10 Hal. 166-174.

<sup>6</sup> Moh Rosyid. 2017. Peredam Konflik Agama: Studi Analisis Penyelesaian Konflik Tolikara Papua 2015. *Jurnal Afkaruna*. Vol. 13. No. 1 Hal 48- 81.

Catatan demi catatan terus mengisi daftar riwayat intoleransi kehidupan beragama di Indonesia. Namun wajah disintegrasi masyarakat multikultural selalu menjadi bom waktu, yang mana perlu adanya kontrol sosial dalam menjaga toleransi agama di Indonesia. Meskipun telah ada pengalaman buruk akibat konflik SARA sebelumnya, bangsa Indonesia masih harus tetap waspada dan berupaya menjaga toleransi antar umat beragama. Tantangan-tantangan ini harus dihadapi dengan serius dan langkah-langkah yang konkret, agar masyarakat dapat hidup berdampingan dengan damai dan menghormati keberagaman agama satu sama lain.

Survei nasional maupun Lembaga riset memeriksa seberapa besar kebebasan beragama/berkeyakinan dijamin dan dilindungi yang dilihat dari regulasi pemerintah, regulasi sosial, regulasi tindakan pemerintah, demografi agama. Salah satunya adalah Lembaga swadaya masyarakat setara institute. Hasil penelitian dari setara institute pada tahun 2021 tentang indeks kota toleransi, terdapat 10 kota yang dianggap memiliki toleransi rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.<sup>7</sup>



---

<sup>7</sup> Setara Institute. 2021. *Ringkasan Eksekutif Indeks Kota Toleran*.

**Tabel 1.1**  
**10 Kota Skor Terendah IKT 2021**

Rangking	Kota	Skor Akhir
85	Makassar	4,517
86	Pekanbaru	4,497
87	Padang	4,460
88	Padang Panjang	4,440
89	Sabang	4,373
90	Langsa	4,363
91	Pariaman	4,233
92	Cilegon	4,087
93	Banda Aceh	4,043
94	Depok	3,577

Sumber: *Setara Institute* Tahun 2021

Berdasarkan hasil kajian tersebut, diperlukan evaluasi dalam upaya meningkatkan penanaman sikap toleransi di masyarakat. Salah satu indikator penting adalah regulasi pemerintah yang juga menjadi fokus perhatian, karena dapat mempengaruhi terciptanya sikap intoleran di kalangan masyarakat. Dalam menerapkan toleransi antar umat beragama, penting bagi masyarakat Indonesia untuk memahami dan menghayati nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.

Di tengah memudarnya nilai-nilai toleransi beragama yang merupakan representasi Pancasila, nyatanya terdapat sebuah daerah yang masih menjaga nilai-nilai toleransi umat beragama, yaitu Kota Padang Panjang yang dikenal sebagai Kota Serambi Mekkah, kota kecil yang selama ini terlihat tentram dan damai. Kota Padang Panjang merupakan kota Pendidikan yang terbuka untuk siapa saja. Dalam bidang Pendidikan salah satu bentuk toleransi umat beragama di Kota Padang Panjang adalah keberadaan sekolah Kristen yaitu SD Fransiskus yang merupakan perwujudan dari praktik toleransi yang mana berbaur dalam dunia Pendidikan tidak



membedakan sekolah muslim dan Kristen salah satu bentuk toleransi beragama di Kota Padang Panjang.

Penelitian yang relevan terkait judul peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Romdloni yang berjudul Toleransi antar Umat Beragama (Studi Kasus Di Desa balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur).<sup>8</sup> Selanjutnya Hermawati, Rina dkk mengenai Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Bandung.<sup>9</sup> Selanjutnya penelitian dari Dwi Astutik yang berjudul Praktik Multikulturalisme Dalam Dunia Pendidikan (Analisis Kekuasaan, Wacana, Pengetahuan Pada Praktik Toleransi di Sekolah Menengah Atas Berbasis Agama Kota Surakarta).<sup>10</sup> Selain itu, terdapat penelitian dari Diba Sofinadya dan Warsono yang berjudul Praktik Toleransi Kehidupan Beragama Pada Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kota Surabaya.<sup>11</sup> Serta penelitian dari Abd. Muid Aris Shofa yang berjudul Praktik Kehidupan Toleransi di Masyarakat Desa Pancasila dan implikasinya terhadap Ketahanan Ideologi (Studi di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Bondowoso).<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Nur Romdloni. 2016. *Toleransi antar Umat Beragama (Studi Kasus Di Desa balun Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan Jawa Timur)*. Skripsi (UIN Sunan Kalijaga)

<sup>9</sup> Hermawati, Rina dkk. 2016. *Toleransi Antar Umat Beragama Di Kota Bandung*. Skripsi (Universitas Walisongo)

<sup>10</sup> Dwi astutik. 2019. Praktik Multikulturalisme Dalam Dunia Pendidikan (Analisis Kekuasaan, Wacana, Pengetahuan Pada Praktik Toleransi di Sekolah Menengah Atas Berbasis Agama Kota Surakarta). *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Antropologi* Vol. 3 N0. 1

<sup>11</sup> Diba Sofinadya dan Warsono. 2023. Praktik Toleransi Kehidupan Beragama Pada Masyarakat Etnis Tionghoa Di Kota Surabaya. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*. Vol. 11 N0. 1

<sup>12</sup> Abd. Muid Aris Shofa. 2022. Praktik Kehidupan Toleransi di Masyarakat Desa Pancasila dan implikasinya terhadap Ketahanan Ideologi (Studi di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Bondowoso). *Jurnal Ketahanan Nasional* Vol. 28 No. 2

Dari beberapa penelitian diatas, penelitian mengenai bentuk-bentuk dari praktik toleransi belum dibahas secara mendalam seperti apa bentuk dari praktik toleransi yang dilakukan oleh pemerintah, apa saja kebijakan maupun program kerja yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan praktik toleransi antar umat beragama, maka dari itu penelitian ini menjadi penting untuk mengisi kekosongan penjelasan tentang bagaimana bentuk dari praktik toleransi umat beragama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang melalui kebijakan atau program kerja. Hal tersebut menjadi kebaruan dalam penelitian ini.

Peneliti pada penelitian ini memfokuskan pada bentuk-bentuk praktik toleransi antar umat beragama yang dilakukan oleh pemerintah Kota Padang Panjang melalui kebijakan maupun program kerja. Penelitian melakukan penelitian yang kemudian diberi judul “Praktik Toleransi Antar Umat Beragama di Kota Padang Panjang Tahun 2021”

## 1.2 Rumusan Masalah

Peraturan Bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri Nomor 8 dan Nomor 9 tahun 2006 mendefinisikan kerukunan umat beragama sebagai kombinasi dari toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Toleransi diartikan sebagai sikap pihak mayoritas yang bersedia menerima, menghormati, dan berkolaborasi dengan pihak minoritas antar umat beragama. Hal ini berlandaskan pada saling pengertian, penghormatan, dan penghargaan satu sama lain, baik dalam hal agama maupun dalam ranah kebangsaan dan kenegaraan.

Melihat konteks keberagaman di Indonesia, tidak terlepas dari adanya pengaruh heterogenitas penduduk Indonesia yang sangat beragam. Karena hal ini yang memunculkan perbedaan dari segi suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) diberbagai daerah. Dari aspek keberagaman keagamaan hanya enam agama resmi yaitu Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan konghucu. Berkaitan dengan keberagaman agama Kota Padang Panjang termasuk daerah yang heterogen dari segi agama, walaupun mayoritas penduduknya beragama Islam. Berikut data jumlah penduduk berdasarkan agama dan keyakinan:

**Tabel 1.2**  
**Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama Yang Dianut Di Kota Padang Panjang**

<b>Penganut Agama</b>	<b>Jumlah</b>
Islam	59.200
Protestan	392
Katolik	357
Hindu	-
Budha	48
Lainnya	1
<b>Jumlah</b>	<b>59.998</b>

*Sumber : BPS Kota Padang Panjang Tahun 2021*

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan jika Padang Panjang mayoritas penduduknya beragama Islam. Meskipun demikian, agama-agama lainnya juga cukup memiliki ruang untuk tumbuh di Padang Panjang. Dari segi keberagaman, Kota Padang Panjang sudah masuk dalam kota yang dihuni dengan penduduk yang terdiri dari berbagai suku dan latar belakang agama yang berbeda. Namun dari hasil survei nasional menunjukkan Kota Padang Panjang memiliki citra negatif pada toleransi dan kerukunan umat beragamanya. Hal ini dilihat dari

penelitian yang dilakukan oleh Setara Institute dalam Indeks Kota Toleran 2021, dari hasil penelitian tersebut terdapat 10 Kota yang mendapat skor terendah termasuk Kota Padang Panjang. Berikut Rekapitulasi 10 Kota Intoleransi dari tahun 2018, 2020 dan 2021:

**Tabel 1.3**  
**Rekapitulasi 10 Kota terendah (2018-2021)**

No	IKT 2018		IKT 2020			IKT 2021		
	Kota	Skor	No	Kota	Skor	No	Kota	Skor
85	Sabang	3,76	85	Pekanbaru	3,85	85	Makassar	4,52
86	Medan	3,71	86	Langsa	3,81	86	Pekanbaru	4,50
87	Makassar	3,64	87	Cilegon	3,73	87	Padang	4,46
88	Bogor	3,53	88	Sabang	3,72	88	Padang Panjang	4,44
89	Depok	3,49	89	Medan	3,67	89	Sabang	4,37
90	Padang	3,45	90	Pangkal Pinang	3,63	90	Langsa	4,36
91	Cilegon	3,42	91	Makassar	3,57	91	Pariaman	4,23
92	DKI Jakarta	2,88	92	Depok	3,35	92	Cilegon	4,09
93	Banda Aceh	2,83	93	Padang	3,18	93	Banda Aceh	4,04
94	Tanjung Balai	2,82	94	Banda Aceh	2,84	94	Depok	3,58

*Sumber : Setara Institute Tahun 2018, 2020, 2021*

Dalam studi IKT ini Setara Institute mengatakan bahwa Kota Padang Panjang dikatakan sebagai Kota Intoleransi dilihat dari empat aspek, pertama Regulasi Pemerintah Kota yang berkaitan dengan rencana pembangunan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan produk hukum pendukung lainnya dan Kebijakan diskriminatif. Kedua, Tindakan Pemerintah dilihat dari pernyataan pejabat kunci tentang peristiwa intoleransi dan tindakan nyata terkait peristiwa. Ketiga, Regulasi Sosial yang berkaitan dengan peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi. Keempat, Demografi Agama dinilai dari heterogenitas keagamaan penduduk dan

inklusi sosial keagamaan. Sehingga dalam penelitian ini akan terfokus pada Regulasi Pemerintah Kota Padang Panjang yang berkaitan dengan rencana pembangunan dalam bentuk RPJMD dan produk hukum pendukung lainnya dan Kebijakan diskriminatif yang dilihat dari peran pemerintah Kota Padang Panjang dalam menghadapi isu intoleransi.<sup>13</sup>

Berangkat dari RPJMD Kota Padang Panjang yang tidak mencerminkan toleransi dan kerukunan, karena pada visi pembangunan jangka panjang daerah Kota Padang Panjang menyatakan: “Kota Yang Maju, Lestari dan Islami”. Kata “Islami” ini yang menjadi landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kemasyarakatan, hal ini tidak menggambarkan kemajemukan masyarakat Kota Padang Panjang, meskipun masyarakat Kota Padang Panjang mayoritas beragama islam namun terdapat beberapa masyarakat yang beragama lain. Visi ini merupakan bentuk dari pengistimewaan terhadap satu agama. Isu toleransi, kerukunan tidak ada perhatian baik dalam program maupun penganggaran dalam RPJMD.<sup>14</sup>

Kemudian, program kerja yang dirancang oleh pemerintah Kota Padang Panjang mengenai sosial dan keagamaan memiliki tujuan terwujudnya tatanan kehidupan sosial masyarakat yang tentram dan agamis yang direalisasikan melalui gerakan gelora serambi mekah dengan kegiatan yang terdiri dari pejuang subuh, subuh mubarakah, maghrib mengaji, *smart surau* dan kampung tahfiz.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Setara Institute. 2021. *Indeks Kota Toleran Tahun 2021*

<sup>14</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 BAB 5 hal 1.

<sup>15</sup> Ibid BAB 5 hal 7

Berdasarkan rincian kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Padang Panjang, peneliti melihat bahwasanya program kerja tersebut hanya mengutamakan pada kegiatan yang berkaitan dengan agama islam saja, padahal masih banyak kegiatan sosial masyarakat yang dapat dirancang untuk semua elemen masyarakat yang menganut agama yang berbeda. Kemudian, Kota Padang Panjang sebagai kota pendidikan yang terkenal dengan julukan Kota Serambi Mekkah yang menjadi salah satu daerah percontohan di bidang Pendidikan berbasis agama Islam masuk ke dalam 10 Kota Intoleran 2021 menurut Setara Institute. Dalam penelitian Setara Institute pada IKT 2018 Kota Padang Panjang berada pada urutan ke 78 dengan skor akhir 4,127, pada IKT 2020 Kota Padang Panjang berada pada urutan ke 72 dengan skor akhir 4,560 dan pada IKT 2021 Kota Padang Panjang masuk dalam 10 Kota Intoleran pada urutan ke 88 dengan skor akhir 4,440.<sup>16</sup>

Berdasarkan dari hasil survei yang dilakukan oleh Setara Institut serta regulasi dan program kerja dari Pemerintah Kota Padang Panjang yang telah diuraikan di atas, terdapat hal yang menarik yaitu terkait respon dari Walikota Padang Panjang Fadly Amran yang mengatakan bahwa Padang Panjang merupakan kota Pendidikan yang selama ini terbuka dengan pihak mana pun, tidak pernah ada isu-isu berbau SARA selama ini, dan Walikota Padang Panjang memastikan tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang intoleran.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Diolah oleh peneliti tahun 2023

<sup>17</sup> DetikNews. 2022. Walkot Padang Panjang Kaget Wilayahnya Masuk Daftar Kota Paling Intoleransi dalam <https://news.detik.com/berita/d-6010428/walkot-padang-panjang-kaget-wilayahnya-masuk-daftar-kota-paling-intoleran> di akses 26 Desember 2022 pada pukul 22.05 WIB

Dari hasil kajian tersebut tentu saja perlu adanya evaluasi terkait penanaman sikap toleransi perlu ditingkatkan lagi. Apalagi yang menjadi salah satu indikatornya yakni regulasi pemerintah yang juga menjadi banyak sorotan yang pada akhirnya memunculkan citra negatif terhadap Kota Padang Panjang ditengah-tengah masyarakat. Dalam menjalankan toleransi umat beragama perlu adanya pemahaman dari masyarakat menjalankan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari serta didukung dengan regulasi dari pemerintah setempat.

Dalam hal ini peneliti melihat adanya upaya untuk meningkatkan praktik toleransi di Kota Padang Panjang melalui pemberian bimbingan dan pengarahan yang intensif dan efektif kepada masyarakat. Pemerintah melalui Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) memberikan bimbingan dan pelatihan kepada masyarakat. pemerintah Kota Padang Panjang dalam untuk meminimalisir terjadinya konflik antar agama pemerintah Kota Padang Panjang melakukan sosialisasi tentang kerukunan umat beragama guna menumbuhkan kesadaran dan meminimalisir konflik umat beragama kepada tokoh agama, tokoh adat, masyarakat serta ke beberapa sekolah yang ada di Kota Padang Panjang.<sup>18</sup>

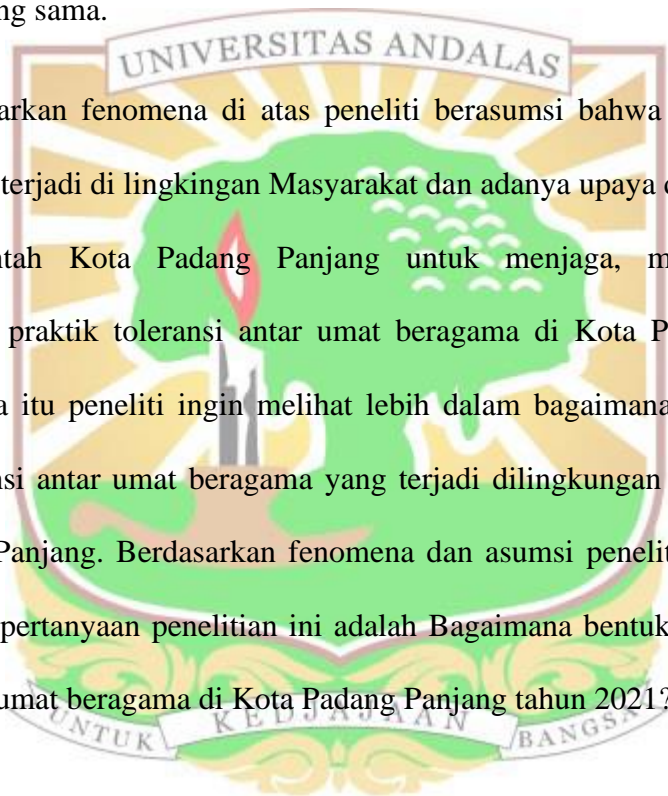
Selanjutnya, dalam bidang Pendidikan dapat dilihat melalui salah satu bentuk toleransi umat beragama di Kota Padang Panjang yaitu keberadaan sekolah kristen yaitu SD Fransiskus yang merupakan perwujudan dari praktik toleransi yang mana berbaur dalam dunia Pendidikan tidak membedakan sekolah muslim dan

---

<sup>18</sup> Antarasumbar. 2021. Minimalisir konflik, FKUB Padang Panjang harus Sosialisasikan ke Masyarakat dalam <https://sumbar.antaranews.com/berita/429718/minimalisir-konflik-fkub-padang-panjang-harus-sosialisasikan-ke-masyarakat> diakses 21 Februari 2023 pada pukul 21.00 WIB

Kristen salah satu bentuk toleransi beragama di Kota Padang Panjang. SD Fransiskus tersebut terletak di Kelurahan Balai-Balai tepatnya dekat dengan perumahan masyarakat. Di SD tersebut pun diberi kebebasan untuk berpakaian kepada murid atau guru, mereka diperbolehkan memakai seragam sesuai dengan ajaran agama mereka masing-masing. Maka dapat disimpulkan bahwa kelompok agama minoritas di Kota Padang Panjang memiliki hak untuk mendapatkan Pendidikan yang sama.

Berdasarkan fenomena di atas peneliti berasumsi bahwa adanya praktik toleransi yang terjadi di lingkungan Masyarakat dan adanya upaya dari Masyarakat serta pemerintah Kota Padang Panjang untuk menjaga, memelihara dan meningkatkan praktik toleransi antar umat beragama di Kota Padang Panjang. Maka daripada itu peneliti ingin melihat lebih dalam bagaimana bentuk-bentuk praktik toleransi antar umat beragama yang terjadi di lingkungan Masyarakat di Kota Padang Panjang. Berdasarkan fenomena dan asumsi peneliti di atas, maka yang menjadi pertanyaan penelitian ini adalah Bagaimana bentuk-bentuk praktik toleransi antarumat beragama di Kota Padang Panjang tahun 2021?





### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk-bentuk dari praktik toleransi antar umat beragama dalam lingkungan Masyarakat di Kota Padang Panjang tahun 2021.

### 1.4. Manfaat Penelitian

#### 1.4.1 Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi peneliti lain dalam memahami bentuk dari praktik toleransi antar umat beragama serta dapat memberikan kontribusi untuk menjelaskan fenomena tersebut.

#### 1.4.2 Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi seluruh pihak yang terkait khususnya masyarakat serta pemangku kepentingan dalam menjaga, memelihara dan meningkatkan praktik toleransi dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan.

